

Lampiran 2

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU

Bulan	Permohonan		Waktu rata-rata pelayanan (hari kerja)	Jumlah permohonan yang dikabulkan		Jumlah permohonan yang ditolak	Alasan permohonan ditolak		
	Unit kerja	Jumlah		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai/ belum selesai didokumentasikan	Lainnya
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru,



dr. JUHAI TRIYANTI AGUSTINA , M.MKes  
Pembina Utama Muda  
NIP 197408182006042025

Lampiran 3

LAPORAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU

Bulan	Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi non Litigasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Permohonan Informasi
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru,



dr. JUHAI TRIYANTI AGUSTINA , M.MKes  
Pembina Utama Muda  
NIP 197408182006042025

## KENDALA DAN SARAN

Adapun kendala yang dihadapi selama tahun 2024 adalah :

1. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):**

- Kurangnya jumlah atau kualitas SDM yang terlatih dalam mengelola informasi dan dokumentasi.
- Tingkat pemahaman dan keterampilan staf dalam hal pengelolaan informasi yang efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. **Infrastruktur Teknologi yang Tidak Memadai:**

- Kurangnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi yang dapat memudahkan pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi informasi.
- Keterbatasan dalam sistem keamanan data yang dapat melindungi informasi yang sensitif atau rahasia.

3. **Keterbatasan Akses dan Transparansi Informasi:**

- Prosedur akses informasi yang rumit atau tidak jelas, sehingga menyulitkan masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
- Ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai jenis informasi yang dapat diakses oleh publik.

4. **Peraturan yang Tidak Konsisten atau Tidak Memadai:**

- Adanya perbedaan interpretasi atas peraturan atau regulasi yang ada, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penerapan PPID.
- Kurangnya peraturan yang lebih spesifik atau update mengenai pengelolaan informasi publik yang terus berkembang.

5. **Kendala dalam Penyusunan dan Klasifikasi Informasi:**

- Kesulitan dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mendokumentasikan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengelolaan informasi yang masih manual atau berbasis dokumen fisik, sehingga menghambat pencarian dan distribusi informasi.

6. **Resistensi atau Kurangnya Dukungan dari Pihak Internal:**

- Tidak semua pihak internal di lembaga atau instansi mendukung penuh pengelolaan informasi publik yang terbuka.
- Keengganan untuk berbagi informasi karena kekhawatiran tentang dampak negatif atau masalah hukum.

7. **Tantangan dalam Penanganan Permintaan Informasi:**

- Keterbatasan waktu atau kapasitas untuk merespons permintaan informasi publik secara tepat waktu.
- Permintaan informasi yang berlebihan atau kurang jelas, yang dapat membebani PPID dalam proses penanganannya.

- Berikut beberapa saran untuk meningkatkan kinerja PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam mengelola informasi publik secara efektif dan transparan :
  1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM):
  2. Pengembangan Infrastruktur Teknologi:
  3. Perbaikan Proses Klasifikasi dan Penyusunan Informasi:
  4. Peningkatan Aksesibilitas Informasi:
  5. Meningkatkan Kolaborasi dengan Pihak Terkait:
  6. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Jelas:
  7. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi untuk Keamanan Data:
  8. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat:
  9. Evaluasi dan Pemantauan Berkala: